

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Asyhadie, Zaenal, 2009, *Peradilan Hubungan Industrial*, Rajawali Pers, Mataram.
- Husni, Lalu, 2010, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.
- Koeshartono, D, 2005, *Hubungan Industrial: Kajian Konsep & Permasalahan*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Ugo, Pujiyo, 2011, *Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soemardjono, Maria, 1997, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Soepomo, Iman, 1990, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, Jambatan, Jakarta.
- Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sutedi, Adrian, 2009, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca perubahan pertama, ketiga dan keempat yang di tetapkan pada tanggal 10 Agustus 2002.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889).

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. (Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 39, Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara, No. 4279).

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial. (Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 125, Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara, No. 4356), jo. Undang-undang No. 1 Tahun 2005 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2005), jo. Undang-undang No. 2 Tahun 2005 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 73 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara No. 4523).

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, Nomor: KEP. 48/MEN/IV/2004, Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama, jo. Peraturan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, Nomor: PER.08/MEN/III/2006 tentang Perubahan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, Nomor: KEP. 48/MEN/IV/2004, Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama, jo. Peraturan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, Nomor: PER.16/MEN/XI/2011, Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, Nomor: PER. 10/MEN/V/2005, Tentang Pengangkatan dan pemberhentian Konsiliator serta Tata Kerja konsiliasi.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, Nomor: PER. 17/MEN/2014, Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial Serta Tata Kerja Mediasi.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, Nomor: PER. 18/MEN/2014, Tentang Honorarium/Imbalan Jasa Bagi Konsiliator dan Penggantian Biaya Bagi Saksi dan Saksi Ahli Dalam Sidang Mediasi

atau Konsiliasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1436).

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004, Tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Massal.